



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIONALD SILABAN
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 117381

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 16.271.064.679**

1. Tanah Seluas 397 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.147.652.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.552.600.000
3. Bangunan Seluas 74 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 576.620.000
4. Bangunan Seluas 132 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.125.875.000
5. Bangunan Seluas 205 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.868.317.679
6. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/148 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 4.200.000.000**

1. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. MOBIL, BMW X3M Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS GR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 907.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	18.662.982.361
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.400.958.910
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.427.645.441
Sub Total	Rp.	53.869.651.391
III. HUTANG	Rp.	535.132.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	53.334.519.391

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.